

BAB VI

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Pendidikan Sistem Ganda sejatinya adalah strategi terpilih dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan secara nasional sebagai manifestasi kebijakan *link and match*. Pada tataran konsep, kehandalan dan nilai ideal yang diusungnya sangat menjanjikan, *acceptable*, dan *futuristik*. Tak heran kemudian bila PSG ini diterapkan di SMK-SMK Negeri maupun Swasta, semua jenis dan bidang keahlian, teknik dan non teknik, serempak di Indonesia. Pada tataran implementasi, terdapat banyak kendala, terutama SMK bidang keahlian non-teknik dan non-bisnis. Seperti bidang keahlian pekerjaan sosial, di mana SMKN 15 Bandung, SMKN 3 Terbanggi Besar, dan SMKN 28 Jakarta termasuk di dalamnya, cukup sulit mendapatkan mitra yang betul-betul relevan dengan kompetensi yang dipelajari siswa dan mau bekerja sama secara utuh berkelanjutan.

Kesulitan tersebut sangat signifikan pengaruhnya terhadap optimal tidaknya pelaksanaan PSG. Kasus yang diteliti di SMKN 15 Bandung, SMKN 3 Terbanggi Besar, dan SMKN 28 Jakarta menunjukkan bahwa mulai *Isi, Proses, Kompetensi Lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan, dan Penilaian* pendidikan dalam implementasi PSG bidang keahlian Pekerjaan Sosial belum optimal, masih memerlukan penyempurnaan.

Isi pendidikan terutama untuk program produktif terkesan masih abstrak dan *debatable*, padahal alokasi waktu pembelajarannya sangat banyak, sehingga cukup menyulitkan untuk membagi secara jelas batas-batas antar kompetensi yang dibelajarkan dan terkesan tumpang tindih.

Proses pendidikan secara normatif sudah memenuhi standar nasional, namun pada pelaksanaan pembelajaran praktek program produktif masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam mengoptimalkan keterlibatan IP dalam proses besar pendidikan.

Kompetensi lulusan bidang keahlian pekerjaan sosial sudah tertuang dalam kurikulum namun belum memiliki ukuran standar secara nasional, sehingga kompetensi pekerja sosial lulusan SMKN 15 Bandung, SMKN 3 Terbanggi Besar, dan SMKN 28 Jakarta belum melampaui tingkat komparasi dan kompetisi yang memadai.

Pendidik dan tenaga kependidikan di SMKN 15 Bandung SMKN 3 Terbanggi Besar, dan SMKN 28 Jakarta secara kuantitatif cukup memadai namun secara kualitatif masih sangat memerlukan peningkatan. Disamping itu keberadaan instruktur atau pembimbing lapangan yang merupakan *think tanks* dalam pelaksanaan praktek kerja industri (prakerin) masih terkendala dengan langkanya mereka yang memiliki kompetensi yang relevan dan mampu memenuhi tuntutan perannya dalam PSG.

Sarana dan prasarana pendidikan SMKN 15 Bandung kondisinya belum memenuhi standar seperti yang dituntut PP 19/2005 maupun untuk implementasi PSG itu sendiri. Kondisi fisik sekolah yang sudah memiliki cukup umur dengan

jumlah lokal yang hanya cukup untuk ruang kelas dan kantor menyebabkan beberapa kebutuhan sarana prasarana tidak terpenuhi, walaupun ada hanya sekedar ada secara minimal. Begitu pun SMKN 3 Terbanggi Besar, dengan dibukanya tiga program keahlian lain membuat sarana prasarana menjadi saling berbagi. Bahkan untuk laboratorium praktek program keahlian pekerjaan sosial pun harus direlakan untuk program lain yang dianggap lebih membutuhkan dan menjanjikan masa depannya. Namun agak lebih baik keadaannya di SMKN 28 Jakarta, di sekolah ini masih cukup memadai sarana dan prasarana yang dibutuhkan program keahlian pekerjaan sosial.

Pengelolaan pendidikan dalam rangka implementasi PSG di SMKN 15 Bandung ini sudah cukup lama dikelola secara mandiri. Namun mandiri dalam keterpaksaan, artinya memang harus mandiri oleh karena keadaan yang menuntut demikian. Sebagai SMK pekerjaan sosial yang hanya satu-satunya di Jawa Barat seharusnya memiliki pemerhati dan pendukung yang banyak, terutama dari pemerintah. Tetapi karena kesendiriannya itu, maka berjuang sendiri lah jadinya. Begitu pula di SMKN 3 Terbanggi Besar, dengan semakin menurunnya animo masyarakat menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut membuat semakin berkurang jumlah siswa yang masuk ke sana. Dan ini berakibat pada berkurangnya perhatian Pemerintah setempat pada pengelolaan dan pengembangan program keahlian pekerjaan sosial tersebut, pun demikian dari PPPG Kejuruan Sawangan. Pembukaan program-program keahlian lain dengan semangat dan dukungan pemerintah setempat menjadikan program keahlian pekerjaan sosial semakin terpinggirkan. Para pengelola program keahlian

pekerjaan sosial seolah menunggu waktu saja sampai benar-benar siswanya habis. Jadi bukan mengelola PSG dalam kemandirian tetapi mengelola dalam kesendirian untuk kemudian ditinggalkan. Bahkan beberapa guru program produktifnya sudah mulai beralih fungsi ke program dan mata diklat lain dengan berbagai pelatihan yang diselenggarakan. Hanya SMKN 28 Jakarta yang tampak masih memiliki kondisi yang lebih baik dalam pengelolaan PSG. Disamping semangat dan perhatian yang masih tinggi dari para pengelola program, pemerintah DKI pun memiliki perhatian tinggi kepada sekolah ini, terbukti ketika sekolah ini memenangi lomba pada setiap even seperti Promosi Kompetensi Siswa (PKS) nasional selalu mendapat hadiah dana pembinaan, walaupun bukan juara satu. Berbeda sekali dengan SMKN 15 Bandung, walaupun setiap PKS nasional selalu masuk 3 besar, jangankan mendapat hadiah dana pembinaan, ucapan selamatpun tidak, yang ada sekolah mengeluarkan dana besar untuk ikut lomba tanpa ada penggantian yang memadai dari pemerintah setempat.

Pembiayaan pendidikan di SMKN 15 Bandung yang bersumber dari orang tua bagian terbesarnya mengenai biaya operasi dan yang dari pemerintah mengenai biaya personal, hampir tidak ada biaya investasi dengan berbagai alasan yang memang rasional. Bahkan setelah setahun terakhir pembiayaan bersumber hanya dari orang tua siswa. Tak jauh berbeda dengan kondisi pembiayaan di SMKN 3 Terbanggi Besar. Tampak berbeda dengan kondisi pembiayaan di SMKN 28 Jakarta. Selain dari sumber orang tua, sekolah ini masih mendapat cukup bantuan dana operasional dari pemerintah DKI, bahkan untuk kesejahteraan gurunya

sebagai pengelola PSG mendapat jatah berlebih dari daerah lain dimanapun di negeri ini.

Penilaian pendidikan di SMKN 15 Bandung dan di SMKN 3 Terbanggi Besar, pun demikian di SMKN 28 Jakarta, terutama yang berkaitan dengan penilaian hasil belajar yang menyangkut kompetensi dan kelulusan peserta didik, sangat didominasi oleh peran aktif hampir sepihak guru-guru sendiri atau pihak sekolah. Ini artinya belum secara maksimal memenuhi tuntutan standar penilaian sebagaimana disyaratkan PP 19/2005.

Namun yang sangat penting disoroti adalah kurang-optimalannya keterlibatan mitra sekolah (IP dan MS) dalam pelaksanaan PSG. Bahkan patut dicermati bahwa sejak munculnya MBS dengan Komite Sekolahnya; MS, baik secara kelembagaan maupun program, menjadi tidak tampak. Tidak jelas apakah MS itu melebur kedalam Komite Sekolah dan menjadi bagian atau organ dari komite itu sendiri, atau lebur dalam arti hancur tak berbekas. Yang pasti, hari-hari ini MS dan perannya tidak tampak dipermukaan. Dari semua sub sistem pelaksanaan PSG yang menjadi bahan eksplorasi penelitian ini menunjukkan rendahnya keterlibatan IP dan MS sebagai mitra sekolah. Bahkan dalam beberapa sub sistem PSG, IP dan MS tidak terlibat sama sekali; seperti dalam sistem PSB, pengelolaan fasilitas dan bahan praktek, optimasi dan eksplorasi sumber pembiayaan, dan dalam monitoring dan evaluasi PSG. Apalagi dengan telah dikembangkannya kurikulum baru berikut pelembagaan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan seakan-akan menguburkan Majelis Sekolah dan Majelis Pendidikan Kejuruan yang selama implementasi PSG merupakan *think tanks* lembaga pendidikan kejuruan.

Rendahnya keterlibatan IP dalam pelaksanaan PSG di SMK tersebut karena beberapa alasan berikut. *Pertama*, sulitnya mendapatkan IP yang betul-betul relevan dengan kompetensi yang dikembangkan di sekolah dan memenuhi tuntutan PSG. Tidak banyak lembaga atau DU/DI yang secara primer mempraktekkan layanan pekerjaan sosial mandiri. Kebanyakan praktek pekerjaan sosial di DU/DI hanya sebagai bagian atau unit kecil dari pelayanan lain yang lebih besar, seperti unit pekerja sosial medis di rumah sakit. Sehingga perlu rangkaian birokratis untuk melibatkan kemitraannya. *Kedua*, walaupun ada lembaga yang secara primer dan utuh melaksanakan sistem layanan pekerjaan sosial, biasanya hanyalah lembaga-lembaga tradisional dan konvensional, seperti panti-panti sosial yang bila dihadapkan pada manajemen modern dan profesional sesuai tuntutan PSG tidak dapat memenuhi nilai ideal yang diharapkan. Oleh karenanya amat sulit memaksimalkan keterlibatannya. *Ketiga*, kurang memadainya pengetahuan dan pemahaman DU/DI terhadap keberadaan dan pentingnya profesi pekerjaan sosial di lingkungan usahanya dimana kompetensinya dikembangkan di SMK. Oleh karena itu tidaklah mudah mengajak industri bermitra. Dan *keempat*, rendahnya daya suai SMK bidang keahlian pekerjaan sosial terhadap nilai ideal PSG yang kental dengan muatan teknik dan bisnis serta manajemen modern. Akibatnya SMK bidang ini kurang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk meyakinkan dunia usaha/industri untuk melakukan kemitraan.

Rendahnya keterlibatan IP dan MS dalam pelaksanaan PSG di SMK ini menyebabkan tidak tercapainya kebermaknaan PSG sebagai strategi terpilih untuk

menghasilkan tamatan yang kompeten di bidangnya sesuai kebutuhan DU/DI. Dengan rendahnya keterlibatan IP ini pun mengakibatkan PSG menjadi tidak utuh, kurang bermakna, dan hampa nilai.

Dapat ditarik inferensi bahwa pelaksanaan PSG di SMK bidang keahlian pekerjaan sosial belum terlaksana dengan baik sesuai pedoman dan cita-cita ideal kebijakan *link and match*. Rendahnya keterlibatan dan kebersamaan IP dalam proses utuh PSG merupakan indikator utama ketidakefektifannya. Menurut penulis hal ini karena *kurang kuatnya upaya membangun pemahaman dan kesepahaman para pihak yang terkait* dalam kebijakan dan strategi ini, baik di tingkat pengambil kebijakan maupun di tingkat pelaksana, di dalam dunia pendidikan sendiri dan juga di DU/DI. Lompatan paradigma penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di SMK bidang keahlian Pekerjaan Sosial ini mengalami stagnasi.

Bila ditarik inferensi lebih jauh dan mendalam lagi, sumber kegagalan pelaksanaan PSG ini adalah bahwa sejak pemilihan dan penetapan konsep sampai pada pemilihan dan penetapan model implementasi prakteknya telah terjadi bias yang cukup signifikan pengaruhnya terhadap kurang-berhasilan pelaksanaannya. Pada tataran konsep, pemilihan dan penetapan PSG sebagai strategi pendidikan menengah kejuruan secara nasional dengan pendekatan *uniformitas* tanpa memperhatikan dengan tegas keanekaragaman keahlian di SMK dengan berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masingnya merupakan kesalahan awal. Jadi sejak konsep telah terjadi ketidaktepatan bila dihubungkan dengan realitas pendidikan menengah kejuruan di Indonesia yang beranekaragam.

Karena sejak konsep sudah memiliki bias seperti itu, maka pada tataran implementasi, praktek PSG menghadapi berbagai kendala yang tidak cukup mudah mengatasinya. Kurangnya keterlibatan IP dalam PSG seperti apa yang terjadi di SMKN 15 Bandung, SMKN 3 Terbanggi Besar, dan SMKN 28 Jakarta ini, sejatinya bukan hanya karena keempat alasan tersebut di atas saja. Tetapi lebih jauh dari itu bahwa pemahaman para pelaku, mulai dari tingkat pengambil kebijakan sampai pada tingkat pelaksana di dunia pendidikan maupun di DU/DI, pun masih kurang. Kemudian yang paling signifikan pengaruhnya terhadap kekurangberhasilan PSG ini adalah pendekatan yang bermuatan *uniformitas*. Pendekatan ini telah menghadapkan para pelaku PSG pada keharusan implementasi program yang seragam dengan standar operasional menasional yang seragam pula, sehingga memaksa sekolah melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mampu dilakukan yang akhirnya terkesan seadanya dan bahkan mengada-ada.

B. IMPLIKASI

Secara konseptual nilai-nilai ideal dan nilai-nilai praktis PSG masih memerlukan penafsiran dari para pihak yang terlibat sejas-jelasnya. Demikian pula terhadap PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang memang masih memerlukan penjabaran dalam peraturan teknis yang lebih rendah dan lebih operasional, seperti peraturan menteri dan *Standar Operasional Procedure (SOP)*-nya. Para pengambil kebijakan dari mulai tingkat Menteri sampai tingkat Dinas Diknas Kota/Kabupaten perlu mempertegas kembali pemberlakuan PSG dan standar nasional pendidikan dengan memperjelas pedoman pelaksanaan yang spesifik berdasarkan jenis dan kelompok keahlian masing-masing SMK. Disamping itu para pengambil kebijakan perlu pula melakukan resosialisasi dan reorientasi serta rasionalisasi PSG bagi para penyelenggara pendidikan menengah kejuruan terutama bidang keahlian non teknik dan bisnis, seperti bidang keahlian pekerjaan sosial. Selanjutnya pada tataran pelaksana dan pelaku PSG di lapangan juga dibutuhkan kemauan dan kemampuan untuk memahami dan merasionalisasi dengan tidak kaku menerjemahkan PSG ini disertai upaya memenuhi tuntutan standar nasional pendidikan. Tanpa melakukan itu sulit kiranya untuk bisa mencapai cita-cita ideal pendidikan menengah kejuruan yang mampu menghasilkan tamatan yang bermutu dan unggul. Orientasi baru paradigma pendidikan dengan sistem *demand driven* yang dipacu oleh kebutuhan pasar kerja dan standar nasional pendidikan yang belum membumi hanya akan menjadi *macan kertas*.

C. REKOMENDASI

Sebagai tindak lanjut dari implikasi tersebut dan untuk mendukung realisasi upaya resosialisasi, reorientasi dan rasionalisasi PSG serta upaya memenuhi tuntutan standar nasional pendidikan tersebut, penulis merekomendasikan sebuah upaya strategis, yaitu **Revitalisasi PSG Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial**. Revitalisasi PSG ini semangat dan *langkah utamanya adalah membangun kesepahaman dan kebersamaan* dunia pendidikan dan DU/DI secara utuh dalam semua proses pendidikan kejuruan bidang keahlian Pekerjaan Sosial, sejak proses perencanaan hingga proses evaluasi dan sertifikasi. Itu artinya bahwa pelibatan DU/DI dalam PSG dilakukan sejak awal hingga akhir kegiatan pendidikan di sekolah, mulai dari PSB hingga ujian akhir/uji kompetensi dan sertifikasi serta penempatan lulusan. Revitalisasi tersebut harus dilakukan di semua tingkatan; pada tingkat nasional oleh pemerintah pusat, di daerah oleh pemerintah propinsi/kabupaten/kota, dan di tingkat sekolah oleh pengelola sekolah. Langkah-langkah yang penulis anjurkan dalam rangka merealisasikan upaya revitalisasi tersebut adalah:

1. Tingkat Nasional

- a. Pemerintah pro-aktif membangun kemitraan dengan DU/DI bidang keahlian Pekerjaan Sosial, Asosiasi Profesi Pekerjaan Sosial, LSM-LSM bidang Pekerjaan Sosial nasional dan international, dan lembaga terkait lainnya untuk membuat payung jejaring kerja operasionalisasi PSG di tingkat bawahnya.

- b. Membentuk wadah bersama pemerintah dan DU/DI serta Asosiasi Profesi bidang keahlian Pekerjaan Sosial untuk secara simultan mengembangkan PSG pada tataran kebijakan nasional, seperti kebijakan tentang standar isi, standar proses, standar kompetensi, dan standar lainnya.
- c. Pemerintah sebaiknya mengeluarkan regulasi yang mendorong bahkan memaksa DU/DI yang bergerak di bidang keahlian Pekerjaan Sosial terlibat secara aktif dan pro-aktif dalam penyelenggaraan proses dan pengelolaan pendidikan menengah kejuruan.
- d. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan sebaiknya juga mengeluarkan regulasi yang memepertegas dan memeperjelas PSG bidang keahlian Pekerjaan Sosial, mulai dari tataran konsep sampai pada tataran operasional.
- e. Pemerintah segera membuat aturan-aturan turunan SNP sebagai kelengkapan PP 19/2005 sebagaimana dituntut dalam setiap pasalnya.
- f. Pemerintah secepatnya meninjau kembali regulasi yang ada yang lebih kental dengan muatan *uniformitas*, kemudian mengembangkan regulasi yang memungkinkan para pelaksana di lapangan melakukan modifikasi dan improvisasi secara legal sesuai kebutuhan dan kondisinya.

2. Daerah

- a. Pemerintah propinsi/kabupaten/kota pro-aktif membangun kemitraan dengan DU/DI bidang keahlian Pekerjaan Sosial, Asosiasi Profesi

Pekerjaan Sosial, LSM-LSM bidang Pekerjaan Sosial setempat, dan lembaga lokal terkait lainnya untuk membuat jejaring kerja operasionalisasi PSG di daerah.

- b. Membentuk wadah bersama pemerintah daerah dan DU/DI serta Asosiasi Profesi bidang keahlian Pekerjaan Sosial lokal untuk secara simultan mengembangkan PSG pada tataran kebijakan daerah dan mengawal implementasi PSG di daerah.
- c. Pemerintah daerah sebaiknya mengeluarkan peraturan daerah yang mendorong bahkan memaksa DU/DI yang bergerak di bidang keahlian Pekerjaan Sosial di daerahnya terlibat secara aktif dan pro-aktif dalam penyelenggaraan proses dan pengelolaan pendidikan menengah kejuruan di sekitarnya.

3. Tingkat Sekolah

- a. Membangun wadah kemitraan dengan DU/DI bidang keahlian Pekerjaan Sosial dan LSM Pekerjaan Sosial lokal untuk jejaring kerja implementasi seluruh proses PSG.
- b. Para penyelenggara pendidikan di SMK bidang keahlian Pekerjaan Sosial sebaiknya selalu membuka diri pada cakrawala perubahan yang senantiasa mengikuti setiap perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan dan DU/DI.
- c. Membangun pemahaman dan penafsiran ulang tentang operasionalisasi PSG sehingga membantu mendorong tingginya daya suai agar mampu meyakinkan DU/DI untuk menjalin kemitraan.

d. Mengingat PSG itu adopsi strategi yang kental dengan pendekatan teknik dan bisnis, maka para penyelenggara SMK bidang keahlian pekerjaan sosial sebaiknya mengembangkan kemampuan menganalogi, memodifikasi dan mengimprovisasi pola-pola yang berbau teknik dan bisnis tersebut ke dalam pola-pola yang relevan dengan kepekerja-sosialan.

Demi menyempurnakan upaya revitalisasi tersebut, penulis merekomendasikan suatu model hipotetik implementasi PSG bidang keahlian Pekerjaan Sosial. Model hipotetik tersebut penulis uraikan secara utuh pada bagian akhir Bab V disertasi ini.

Kemudian bahwa penelitian ini hanyalah sebuah studi evaluatif terhadap kasus yang terjadi pada tiga SMK bidang keahlian Pekerjaan Sosial, yang sifatnya eksploratif informatif. Dan alternatif model hipotetik yang direkomendasikan semata sebuah saran pikir penulis *al-fakir* yang pasti masih memiliki kelemahan. Para pengguna hasil penelitian ini perlu mencernanya dengan seksama penuh pengertian karena kelebihan dan kekurangan yang terekspose dari ketiga SMK ini tidak bisa digeneralisasikan, sekalipun pada sekolah sejenis. Hanya saja, mungkin hasil penelitian ini memiliki transferabilitas atau dapat dianalogikan dan dijadikan bahan pembanding bagi penelitian sejenis di sekolah yang lain atau penelitian lanjutan. Dari hasil penelitian ini dapat dikembangkan kepada penelitian mengenai faktor-faktor penghambat dan penunjang keterlaksanaan PSG di SMK bidang keahlian pekerjaan sosial atau korelasi tingkat pemahaman pelaku pendidikan dan DU/DI terhadap keterlibatannya dalam pelaksanaan PSG, atau juga

penelitian tentang model PSG pada SMK bidang keahlian pekerjaan sosial, dan penelitian lain yang dapat menyempurnakan penelitian yang telah penulis lakukan ini. Alhamdulillah. Terima kasih.

